

## **Masuki Semester II Tahun 2020, BPJS Kesehatan Tuntas Bayar Seluruh Klaim RS**

Jakarta (01/07/2020) – Mengawali bulan Juli 2020, BPJS Kesehatan menerima iuran peserta Penerima Bantuan iuran (PBI) APBN dari pemerintah sebesar Rp 4,05 triliun. Dengan diterimanya iuran tersebut, BPJS Kesehatan memastikan per hari ini tidak ada klaim rumah sakit yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf, penerimaan iuran PBI APBN di muka ini menunjukkan dukungan dan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sekaligus menjaga likuiditas rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Posisi hutang klaim BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 adalah Rp 3,70 triliun. Begitu iuran PBI APBN ini kami terima, langsung kami distribusikan untuk melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit. Jadi tidak ada lagi utang jatuh tempo bagi rumah sakit yang sudah mengajukan klaim dan lolos verifikasi. Untuk pembayarannya tetap menggunakan mekanisme first in first out," jelasnya, Rabu (01/07).

Iqbal mengatakan, selanjutnya BPJS Kesehatan akan memanfaatkan dana iuran PBI APBN tersebut dan ditambah dengan penerimaan iuran lainnya untuk menjaga agar pembayaran klaim dapat dilakukan tepat waktu sesuai dana yang tersedia.

"Kami ucapkan terima kasih Kementerian Keuangan yang telah membuktikan komitmen pemerintah dalam memastikan pembayaran klaim rumah sakit berjalan lancar," ucap Iqbal.

Di sisi lain, Iqbal menyebut bahwa melalui penyesuaian iuran, pemerintah berkomitmen memastikan kesinambungan Program JKN-KIS dan memperbaiki layanannya. Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 untuk kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3. Namun khusus kelas 3, di tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp 25.500,-, sisanya sebesar 16.500,- dibiayai oleh pemerintah.

"Dengan berlakunya nominal iuran yang baru, diharapkan akar masalah defisit BPJS Kesehatan bisa mulai terurai. Di sisi lain, kami tetap butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem Program JKN-KIS yang sehat," ujar Iqbal.

Sampai dengan Mei 2020, kolektabilitas iuran PBPU yang semula berkisar di angka 60% naik menjadi 73,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan peserta JKN-KIS untuk membayar iuran semakin meningkat. Iqbal pun mengingatkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS, bukan hanya pemerintah saja yang berkontribusi melainkan masyarakat juga harus ambil bagian.

Dari 220,6 juta peserta JKN-KIS, sekitar 60 persen peserta dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Selain itu, juga ada iuran untuk aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri. Hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun. Di tahun 2019 saja, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI APBN sebesar Rp 48,71 triliun. Sementara untuk tahun 2020, pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun. Belum lagi untuk segmen PBI APBD.

"Masyarakat kami harapkan dapat ikut turun tangan menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS. Dimulai dari hal yang sederhana saja, misalnya mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS selagi sehat,

membayar iuran JKN-KIS secara rutin, tepat waktu, dan tidak menunggak, serta menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih,” pesan Iqbal.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut hubungi:

**Humas BPJS Kesehatan**

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62 21 424 6063

Website : [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

Twitter : @BPJSKesehatanRI

Instagram : @bpjskesehatan\_ri

Facebook : BPJS Kesehatan

Youtube : BPJS Kesehatan

Kompasiana : BPJS Kesehatan

Kaskus : bpjskesehatan

**PRESS RELEASE**

**Entering the Second Semester of 2020, BPJS Kesehatan Completely Pay All Claims of the Hospital**

Jakarta (01/07/2020) - Starting in July 2020, BPJS Kesehatan received contributions of the State Budget Contribution (PBI) from the government of Rp. 4.05 trillion. With the receipt of these contributions, BPJS Kesehatan ensures that as of today there are no hospital claims that are due and unpaid.

According to the Head of Public Relations of BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf, the receipt of PBI APBN contributions in advance shows the government's support and commitment to help the liquidity of the Social Security Fund (DJS) For Health while maintaining hospital liquidity amid the Covid-19 pandemic.

"The amount of the BPJS Kesehatan claims debt as of 1 July 2020 is Rp 3.70 trillion. Once we receive this PBI APBN contribution, we immediately distribute it to settle claims for all hospitals. So there is no more debt due for hospitals that have submitted claims and passed verification. "For payment, keep using the mechanism first in first out," he explained, Wednesday (01/07).

Iqbal said, BPJS Kesehatan will utilize the PBI APBN contribution and supplemented with the receipt of other contributions to maintain that payment of claims can be made on time according to the available funds.

"We thank the Ministry of Finance for proving the government's commitment in ensuring payment of hospital claims goes smoothly," said Iqbal.

On the other hand, Iqbal mentioned that through contributions adjustments, the government is committed in ensuring the sustainability of the JKN-KIS Program and improving its services. In accordance with the mandate of the Presidential Regulation (Perpres) No. 64 of 2020, as of July 1, 2020 JKN-KIS contributions for Non-Wage Workers (PBPU) and Non-Workers (BP) participants were adjusted to Rp 150,000 for class 1, Rp 100,000 for class 2, and Rp. 42,000 for class 3. But specifically for class 3, in 2020, participants only pay Rp. 25,500, - the remaining 16,500, - is funded by the government.

"With the enactment of the new nominal fee, it is hoped that the root of BPJS Kesehatan deficit can begin to unravel. On the other hand, we still need support from various parties to create a healthy JKN-KIS Program ecosystem," said Iqbal.

Up to May 2020, the collectability of PBPU contributions, which initially ranged from 60%, increased to 73.68%. This shows that the awareness and willingness of JKN-KIS participants to pay dues is increasing. Iqbal also reminded that in order to maintain the continuity of the JKN-KIS Program, not only the government who contribute but the community also have to take part.

Of the 220.6 million JKN-KIS participants, around 60 percent of the participants were funded by the government. To be precise, there are 96.8 million poor and unable people whose JKN-KIS contributions are borne by the state through the state budget and 37.3 million residents are covered by the regional budget. In addition, there are also contributions for the state civil apparatus as well as the TNI and Polri. Until 2018 the government has spent approximately Rp. 115 trillion. In 2019 alone, the total cost paid by the government for PBI APBN segment is Rp 48.71 trillion. While for 2020, the government will pay the PBI APBN segment amounting to Rp 48.74 trillion. Not to mention the PBI APBD segment.

"We hope that our community take part in maintaining the sustainability of the JKN-KIS Program. Starting from simple things, for example registering yourself and family as JKN-KIS participants while healthy, paying JKN-KIS contributions regularly, on time, and not in arrears, as well as maintaining health by implementing healthy and clean behavior," Iqbal said.

\*\*\*\*